

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI
UPAYA PENERAPAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DI
KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA**

Elis Viranda

Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
elisvirandaaa@gmail.com

Rachmawati Novaria

Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
nova@untag-sby.ac.id

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adi_susiantoro@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia, masalah sampah semakin kompleks. Pengelolaan sampah menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui bank sampah sesuai dengan poin 12 *Sustainable Development Goals* (SDGs) konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Meskipun ada kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya, pengelolaan sampah di lokasi ini belum optimal karena sampah rumah tangga masih dibuang di lingkungan sekitar, tingginya jumlah sampah yang masuk ke TPA, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah. Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) di wilayah ini memiliki potensi signifikan untuk membantu menyelesaikan masalah sampah yang dihadapi. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dan berlandaskan pada Teori Van Meter dan Van Horn.

Kata Kunci: *Pengelolaan Sampah, Bank Sampah, Sustainable Development Goals (SDGs), Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS)*

ABSTRACT

In Indonesia, the waste problem is increasingly complex. Waste management uses the 3R principle (*Reduce, Reuse, Recycle*) through waste banks in accordance with point 12 of the *Sustainable Development Goals* (SDGs) responsible consumption and production. Even though there are policies that support waste management, Surabaya City Regional Regulation no. 1 of 2019 concerning Amendments to

Regional Regulation no. 5 of 2019 concerning Waste Management and Cleanliness in the City of Surabaya, waste management at this location is not optimal because household waste is still dumped in the surrounding environment, the high amount of waste goes to the landfill, and there is a lack of public awareness about the importance of managing waste. Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) in this region has significant potential to help solve the waste problem faced. This research applies a qualitative descriptive method and is based on the Van Meter and Van Horn theories.

Keywords: *Waste Management, Waste Bank, Sustainable Development Goals (SDGs), Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS)*

A. PENDAHULUAN

Lingkungan adalah konteks di mana manusia berada dan saling berinteraksi memengaruhi dinamika kehidupan. Saat ini, persoalan lingkungan menjadi permasalahan yang sangat serius, dan manusia berperan penting dalam permasalahan ini karena kegiatan manusia kadang-kadang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sampah adalah residu dari aktivitas manusia sehari-hari yang telah kehilangan nilai dan tidak dapat dipergunakan kembali. Manusia menghasilkan minimal dua kategori limbah, yakni sampah yang terbentuk dari bahan organik dan sampah yang terbuat dari bahan anorganik (Aulia, 2022). Sampah yang terbentuk dari bahan organik seperti sisa makanan dan dedaunan dapat menghasilkan gas metana jika tidak dikelola dengan baik, sedangkan sampah anorganik seperti plastik dan logam dapat mencemari tanah dan air serta mengancam kehidupan satwa liar dan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan upaya untuk mengurangi produksi limbah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi mendatang.



Gambar 1.1 Grafik Komposisi Sampah Tahun 2023
Sumber: ((SIPSAN), 2024)

Data dikumpulkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSAN) yang menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Menurut grafik komposisi sampah, menunjukkan sampah rumah tangga menyumbang paling banyak mencapai 38,9%, diikuti oleh sampah pasar tradisional sebanyak 20,3%.

Dalam hal jenis sampah, sampah sisa makanan mendominasi dengan persentase 43,4%, diikuti oleh sampah plastik yang mencapai 10,7%. Data ini menggarisbawahi pentingnya tindakan segera dalam mengelola sampah, terutama dalam mengurangi produksi sampah rumah tangga dan meningkatkan pengelolaan sisa makanan serta plastik untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, menetapkan bahwa pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terkoordinasi dari awal hingga akhir proses, dengan keterlibatan dari pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi masyarakat, menggunakan pendekatan ekonomi yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan masyarakat yang sehat dan keuntungan ekonomi. Pengelolaan sampah dilakukan di tingkat kabupaten dan kecamatan serta di tingkat pemerintah pusat. Selain itu, pengelolaan sampah dapat dilakukan di setiap lokasi jika masyarakat sekitar yang peduli dengan masalah sampah memulainya (Amalia & Tauran, 2023).

Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan strategi yang digunakan dalam pengelolaan sampah untuk meminimalisir volume sampah yang berakhir di TPA. Melalui penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sampah tidak semata-mata dilihat sebagai limbah, melainkan sebagai aset yang memiliki potensi nilai ekonomis dan manfaat lingkungan yang dapat dieksploitasi kembali. Bank sampah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan mendaur ulang dan memilah sampah. Aspek penting dari pengelolaan sampah adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah melalui bank sampah termasuk dalam poin 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab. Selanjutnya, sistem pengelolaan sampah dengan menggunakan bank sampah turut berkontribusi terhadap efek sosial yang menguntungkan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengumpulkan dan menjual sampah yang sudah dipilah, masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan sehingga meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, bank sampah bukan hanya solusi lokal untuk masalah sampah tetapi juga merupakan langkah konkret dalam mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Menurut informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, ditemukan bahwa sampah organik merupakan mayoritas dari 1.600 ton sampah yang ditampung di TPA Benowo. Menurut Kepala DLH Surabaya, volume sampah organik yang mendominasi masuk ke TPA Benowo mencapai 1.600 ton setiap harinya, sementara jenis sampah anorganik merupakan persentase yang lebih rendah. Total volume sampah pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai 1.590 ton yang disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi yang mengakibatkan peningkatan mobilitas masyarakat menuju Kota Surabaya (Pradana, 2023). Dengan meningkatnya jumlah sampah di TPA Benowo, penting adanya bank sampah untuk mengelola dan mendaur ulang sampah organik maupun anorganik. Di bawah ini merupakan gambar dari sampah rumah tangga yang masih dibuang oleh masyarakat sekitar ke saluran air.



Gambar 1. Sampah Rumah Tangga Di Manyar Sabrangan
Sumber: Peneliti

Gambar di atas menunjukkan keadaan saluran air yang penuh dengan sampah plastik seperti botol, kemasan makanan, dan berbagai jenis limbah rumah tangga lainnya. Situasi ini menunjukkan masalah besar dalam pengelolaan sampah di wilayah ini. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi dan kesadaran warga akan pentingnya pengelolaan sampah yang tepat serta pemeliharaan kebersihan lingkungan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, masih terdapat banyak limbah rumah tangga yang diarahkan ke saluran air oleh penduduk sekitar.



Gambar 2. Sampah Rumah Tangga Di Kalijudan
Sumber: Peneliti

Seperti yang ditunjukkan di gambar di atas, saluran air di wilayah tersebut penuh dengan sampah plastik dan anorganik. Penyumbatan aliran air, peningkatan risiko banjir, dan pencemaran air yang dapat mengganggu ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat adalah beberapa dampak negatif sampah yang menumpuk di saluran air.

Permasalahan sampah di lokasi ini yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah karena masih ditemukan banyak sampah yang dibuang di lingkungan sekitar, tingginya jumlah sampah yang masuk ke TPA, dan masyarakat kurang menyadari pentingnya pengelolaan sampah. Aturan tentang pengelolaan sampah

melalui bank sampah telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya. Di Kecamatan Mulyorejo ada Bank sampah induk surabaya (BSIS). Bank sampah ini fokus pada penyediaan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Program ini merupakan inisiatif kewirausahaan di bidang lingkungan yang diinisiasi oleh Yayasan Bina Bhakti Lingkungan, dan merupakan pengembangan dari program edukasi serta bank sampah yang terbukti efektif di kalangan masyarakat. Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menjadi landasan utama dalam operasionalnya, yang tidak hanya memberikan layanan pengelolaan sampah yang efektif tetapi juga menjadi pusat edukasi bagi masyarakat sekitar. Bank sampah ini telah berhasil mengelola sampah dengan total sampah terkelola pada tahun 2022 mencapai 427.820 kg. Namun, kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah masih sangat perlu ditingkatkan. Melalui layanan Edukasi Pengelolaan Sampah berupaya meningkatkan kesadaran tersebut. Selain itu, Bank sampah ini juga menjalankan program Mitra Pengolahan Sampah, program Donasi Sampah dalam hal ini dapat mengoptimalkan nilai ekonomi dari sampah untuk membantu sesama, sementara melalui program Jemput Sampah yakni memberikan kemudahan bagi nasabah dalam membawa sampah yang sudah dipilah ke lokasi gudang. Bank sampah ini menerima 55 macam sampah yang sudah dipilah, yang mencakup bahan-bahan seperti kertas, plastik, besi, dan sebagainya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003) sebagaimana dikutip oleh (Naufal, 2019), kebijakan public memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat yang berdaulat, karena melalui kebijakan publik kesejahteraan dan ketentraman masyarakat dapat tercapai. Peraturan yang dibuat oleh pemeerintah biasanya dikaitan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik mencakup banyak sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan publik dapat bersifat regional, nasional, atau lokal berdasarkan hierarki.

Menurut (Naufal, 2019), Budi Winarno (2016) mengemukakan empat definisi mengenai kebijakan publik yang mencakup, pertama, kebijakan publik adalah instrument yang diciptakan unruk mencapai tujuan khusus. Kedua, kebijakan publik merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh badan pemerintahan, bukan oleh perorangan. Ketiga, kebijakan publik mencerminkan tindakan nyata yang diimplementasikan oleh pemerintah, bukan hanya aspirasi atau keinginan semata. Keempat, kebijakan publik memiliki ciri positif maupun ciri negative. Keberadaan sebuah kebijakan publik yang berupaya untuk melakukan intervensi terhadap masalah dapat dianggap sebagai ciri positif, sedangkan saat pemerintah tidak campur tangan terhadap permasalahan tersebut, hal tersebut dianggap sebagai ciri negatif.

Proses Kebijakan Publik

Menurut (Alaslan, 2021) pada umumnya, proses kebijakan publik meliputi empat tahap utama, yaitu:

1. Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*), Pada tahap ini, isu-isu yang dihadapi masyarakat bertransformasi menjadi isu kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penilaian dan penyelidikan menyeluruh terhadap masalah yang muncul.
2. Tahap Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*), pada tahap ini para pembuat akan membahas masalah yang telah dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, masalah tersebut akan diuraikan sebagai salah satu dari banyak pilihan yang tersedia. Tahap ini akan menghadapi kompleksitas yang signifikan karena melibatkan berbagai pihak dalam proses perumusannya, sehingga berbagai kepentingan tersebut akan sulit disatukan tanpa adanya kompromi atau kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
3. Tahap Implementasi (*Policy Implementation*), pada tahap ini program yang telah dirumuskan sebagai salah satu solusi masalah kemudian dijalankan oleh lembaga administrasi, agen, atau birokrasi pemerintah di tingkat bawah. Dalam tahap ini, beragam kepentingan akan berkompetisi satu sama lain.
4. Tahap Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*), Pada tahap ini, kebijakan yang sudah diberlakukan akan ditinjau kembali untuk mengukur efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dalam proses evaluasi ini, pengaruh dari kebijakan tersebut menjadi salah satu aspek penilaian. Oleh karena itu, ada standar tertentu yang akan digunakan untuk menilai kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan

Setelah perencanaan kebijakan selesai, implementasi diperlukan untuk menilai efektifitas kebijakan. Menurut Pramono (2020) dalam (Pitaloka & Novaria, 2024) Implementasi kebijakan merupakan serangkaian langkah yang dijalankan oleh berbagai pelaksana dengan tujuan untuk mencapai hasil yang sejalan dengan target atau tujuan dari kebijakan tersebut. Setelah tujuan dan sasaran suatu kebijakan telah ditentukan, implementasi dapat dimulai.

Model Implementasi Kebijakan

Berdasarkan Van Meter dan Van Horn, seperti yang dikutip oleh (Gesthaviona, 2018) ada enam indikator yang berdampak pada efektivitas implementasi, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, harus bisa direalisasikan dengan kejelasan.
2. Sumber Daya, untuk melaksanakan kebijakan, dibutuhkan sumber daya baik yang bersifat manusia maupun non-manusia.
3. Komunikasi Antar Organisasi, hal ini mengindikasikan bahwa program memerlukan dukungan dan koordinasi bersama organisasi lain.
4. Karakteristik Agen Pelaksana, termasuk di dalamnya struktur birokrasi, standar, dan model interaksi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program.
5. Disposisi (Sikap) Pelaksana, Yang melibatkan tanggapan dari pelaksana, pemahaman mereka terhadap kebijakan, serta pilihan nilai yang dipegang oleh pelaksana tersebut.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti sumber daya ekonomi lingkungan, dukungan dari kelompok kepentingan, ciri-ciri peserta, serta pandangan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjenis kualitatif deskriptif untuk metode pendekatannya menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS), serta di lingkungan masyarakat sekitar Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS). Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dengan memanfaatkan bank sampah yang menggunakan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Teori Van Meter dan Van Horn digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya manajemen sampah. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan Kesimpulan dari data tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn. Peneliti akan membahas temuan pada bagian ini. Berikut adalah pembahasan tentang temuan penelitian:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa untuk mengukur dan meningkatkan peluang keberhasilan suatu kebijakan, perlu diperhatikan apakah standar dan sasaran kebijakan tersebut sesuai dengan kriteria, fungsi, dan hasil yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi keberhasilan penerapan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Analisis data dari penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan pengelolaan sampah menunjukkan pencapaian yang signifikan terhadap poin 12 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 12 konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Menurut Van Meter dan Van Horn, untuk menilai dan memperbesar kemungkinan sukses dari sebuah kebijakan, penting untuk memastikan bahwa standar dan target yang ditetapkan sesuai dengan kriteria, fungsi, dan hasil yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Ini dapat menjadi patokan untuk menilai apakah kebijakan yang diimplementasikan berhasil memenuhi tujuan yang ditetapkan atau tidak. Data laporan perkembangan nasabah yang peneliti peroleh menunjukkan peningkatan jumlah nasabah baru dan terdaftar termasuk individu, Bank Sampah Unit, sekolah, dan kantor/LSM. Hambatan yang dihadapi dalam hal ini yaitu masih kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kepentingan dari pengelolaan sampah.

b. Sumber Daya

Sumber daya, menurut Van Meter dan Van Horn adalah indikator kedua yang sangat mem Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi sumber daya sebagai faktor kedua yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Ketidaksesuaian atau kekurangan sumber daya yang relevan dengan penerapan kebijakan dapat berdampak negatif pada hasil yang dicapai. Menurut analisis data dari sumber daya yang relevan, berhasil menunjukkan kontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab). Dari segi sumber daya manusia, kendala dalam hal armada untuk pengangkutan sampah terpilah dari Bank Sampah Unit ke Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS). Armada yang dimiliki Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) saat ini 1 pick up dan 5 tossa, namun yang digunakan untuk penjemputan sampah hanya 1 pick up dan 3 tossa, 2 tossa lainnya tidak digunakan untuk penjemputan sampah hanya digunakan untuk penjualan atau membeli galon dikarenakan kondisinya tidak prima.

Ini menunjukkan bahwa masih ada masalah yang perlu diselesaikan saat menerapkan kebijakan pengelolaan sampah. Namun, hal ini diimbangi dengan Inisiatif untuk memajukan kompetensi mengembangkan sumber daya manusia melalui serangkaian pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi kader lingkungan serta rekrutmen karyawan baru, khususnya dari kalangan masyarakat miskin. Total SDM yang dimiliki Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) tahun 2023 adalah 16 karyawan lama, 1 karyawan baru, dan 3 karyawan yang sedang menjalani *training*, hal ini mencerminkan komitmen untuk inklusi sosial dan ekonomi sejalan dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ini menunjukkan komitmen untuk memberdayakan masyarakat sekitar Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS). Dari sumber daya non manusia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memanfaatkan teknologi seperti aplikasi Sibasam (Aplikasi Bank Sampah) serta menggunakan mesin press untuk meningkatkan efisiensi dalam pengepakan sampah sebelum didaur ulang untuk mendukung prinsip pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang ditekankan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Gambar di bawah ini merupakan lokasi pengelolaan sampah yang ada di Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS).



Gambar 3. Gudang Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS)
Sumber: Peneliti

Gambar di atas menggambarkan gudang Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) yang biasanya digunakan untuk melakukan pemilahan kembali dan pengemasan sampah yang sudah terpilah sesuai jenisnya sebelum dikirim ke pabrik industri daur ulang.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Sebagai indikator ketiga, Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya komunikasi antar organisasi. Apabila komunikasi ini tidak efektif, maka pelaksanaan kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah akan terhambat dan berdampak pada hasil yang dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, komunikasi antar organisasi terkait dengan penerapan kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah sudah berjalan cukup baik dan komunikasi antar organisasi terlihat cukup lancar. Komunikasi dilakukan antar organisasi baik melalui rapat-rapat, grup Whatsapp, maupun keanggotaan dalam asosiasi terkait merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab). Strategi komunikasi yang terkoordinasi dengan baik, seperti pertemuan rutin dan partisipasi dalam forum-forum terkait, memungkinkan sinergi antar organisasi dalam upaya pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sebagai upaya penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antar organisasi telah berperan penting dalam memajukan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 12 tersebut.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Horn mengidentifikasi karakteristik dari agen pelaksana sebagai indikator keempat. Pembuat kebijakan perlu melibatkan pelaksana, organisasi, dan instansi dengan ciri-ciri yang sesuai untuk mendukung penerapan dan pelaksanaan kebijakan secara efektif. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari penelitian, peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab). Dalam hal pengawasan dan monitoring yang rutin, menunjukkan komitmen untuk memastikan kinerja dan efektivitas bank sampah. Profesionalisme dalam menjalankan tugas serta pembagian tugas yang jelas mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Kolaborasi tim manajemen dan kegiatan edukasi kepada masyarakat menegaskan komitmen dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah secara keseluruhan menunjukkan langkah positif menuju pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

e. Disposisi (Sikap) Pelaksana

Disposisi (sikap) pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn, adalah indikator kelima untuk mengevaluasi suatu kebijakan dan meningkatkan tingkat keberhasilan implementasinya. Dalam implementasi kebijakan, penting untuk mengetahui apakah agen pelaksana menerima atau menolak kebijakan tersebut. Kesuksesan atau kegagalan dalam melaksanakan kebijakan sangat dipengaruhi oleh penerimaan atau penolakan terhadapnya, sebagaimana yang terungkap dalam data

yang diperoleh dari penelitian, sikap proaktif dan tanggap para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah mencerminkan komitmen terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 12 (konsumsi dan produksi bertanggungjawab). Dalam hal sosialisasi dan edukasi, terdapat komitmen untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang terbuang secara tidak efisien. Upaya dalam mengatasi kendala, seperti memastikan bank sampah tidak menerima sampah tertentu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah. Dengan sikap proaktif dan tanggap ini, implementasi kebijakan pengelolaan sampah memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan pengurangan sampah yang terbuang secara efektif, sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 12.

f. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa indikator terakhir berpengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan. Kondisi-kondisi tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan data dari hasil penelitian terlihat bahwa bank sampah telah berhasil dan memberikan dampak yang positif pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pendapatan tambahan dari pengelolaan sampah telah meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, Selain itu, bank sampah juga telah menciptakan peluang ekonomi baru melalui kreativitas dalam pengolahan sampah menjadi produk bernilai tambah. Menurut data laporan sumber sampah tahun 2023 di Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS), ada banyak sampah yang disetor oleh pelanggan ke bank sampah, dan nilai transaksinya cukup besar. Ini menunjukkan minat masyarakat dalam menyeter sampah ke bank sampah dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab). Selain itu, data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga menunjukkan peningkatan jumlah bank sampah dan tonase sampah yang dikelola, menunjukkan bahwa bank sampah telah berhasil dalam mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan sampah. Meskipun terdapat kendala dari Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) seperti fluktuasi harga sampah yang mempengaruhi ekonomi, upaya penyesuaian dan promosi yang dilakukan oleh pihak tersebut mampu untuk mengatasinya.

E. KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 1 Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya peneliti dapat menyimpulkan, dalam indikator standar dan sasaran kebijakan telah diterapkan dengan baik melalui bank sampah sebagai solusi efektif, menunjukkan berhasil mengurangi sampah yang dikirim ke TPA. Hambatannya kesadaran masyarakat masih kurang terkait pentingnya pengelolaan sampah. Indikator sumber daya, menunjukkan cukup berhasil dengan peningkatan kualitas SDM, penggunaan mesin press, Aplikasi Sibasam, dan SIPSN. Hambatannya yaitu armada yang dimiliki Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) terbatas sehingga terjadi antrian kurang lebih 1 minggu dalam penjemputan sampah dan akses transportasi

terkadang terkendala karena gang sempit. Untuk indikator komunikasi antar organisasi menunjukkan berhasil, dalam hal ini komunikasi dilakukan dengan organisasi pemerintah, LSM, perguruan tinggi, OPD, kader-kader berjalan dengan lancar melalui rapat-rapat rutin secara *online* maupun *offline*, serta keaterlibatan Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) dalam Asosiasi Bank Sampah. Karakteristik agen pelaksana menunjukkan cukup berhasil, agen pelaksana bekerja secara profesional sesuai dengan tupoksi, monitoring rutin melalui kunjungan langsung maupun menggunakan Aplikasi SIPSN dan Sibasam, edukasi *online* maupun *offline* teratur. Dalam indikator disposisi (sikap) pelaksana telah berhasil, dengan aktifnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam sosialisasi dan pendampingan untuk pembentukan bank sampah di lingkungan masyarakat atau instansi serta adanya kompetisi. Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) secara berkala melaporkan kinerjanya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) juga terlibat dalam edukasi ke masyarakat melalui *media social* atau melibatkan generasi muda. Indikator kondisi ekonomi, sosial, dan politik, berhasil meningkatkan pendapatan tambahan bagi nasabah yang berpartisipasi di bank sampah. Dukungan masyarakat terlihat dari semakin banyak jumlah bank sampah di kota ini yakni 655 unit serta semakin banyak sampah yang disetor ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2021). *FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK : Studi Relokasi Pasar*.
- Amalia, I., & Tauran. (2023). *Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah Berkah Pada Perumahan Permata Kwangsa Residence Kabupaten Sidoarjo*.
- Aulia, A. R. (2022). *Peran Bank Sampah Tri Alam Lestari*.
- Gesthaviona, C. (2018). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Dan Pemanfaatan Air Limbah Di Kota Tangerang*.
- Naufal, M. (2019). *KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONFLIK SOSIAL (Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran di Manggarai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)*.
- Pitaloka, A. D., & Novaria, R. (2024). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Kemayoran Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2.
- Pradana, A. (2023, July). *DLH Surabaya Catat 1.600 Ton Sampah Di TPA Benowo Didominasi Jenis Organik*. <https://jatim.antaraneews.com/Berita/713517/Dlh-Surabaya-Catat-1600-Ton-Sampah-Di-Tpa-Benowo-Didominasi-Jenis-Organik>.
- (SIPSN). (2024, June 2). <https://sipsn.menlhk.go.id/Sipsn/>.